



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN  
  SEKRETARIAT KABINET  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020  
**AUDITED**

## **BAGIAN ANGGARAN 114**



## **SEKRETARIAT KABINET**

### **LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 (*Audited*)**

Jl. Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110  
<http://www.setkab.go.id>



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (Setkab), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Setkab atas Laporan Keuangan**

Setkab bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Setkab untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Setkab. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Setkab, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 71B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CSFA, CA  
Register Negara Akuntan Nomor 8066



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Kabinet adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Kabinet. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk



PERPUSTAKAAN  
SEKRETARIS KABINET

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 April 2021  
Sekretaris Kabinet,





**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Telah Direviu .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	viii
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	3
II. Neraca .....	4
III. Laporan Operasional .....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
A. Penjelasan Umum .....	7
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	23
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca .....	33
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional .....	46
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	55
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya .....	57
VI. Lampiran I: Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	
Lampiran II: Neraca Percobaan Akrual	



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH MEREVIU**

**PERNYATAAN TELAH MEREVIU  
LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 9 Februari 2021  
Inspektur Sekretariat Kabinet,

Hendri Daud

NIP. 19620629 198302 1 001

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 April 2021  
Sekretaris Kabinet,





**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1	3
Tabel 2	4
Tabel 3	5
Tabel 4	6
Tabel 5	17
Tabel 6	18
Tabel 7	20
Tabel 8	21
Tabel 9	24
Tabel 10	24
Tabel 11	25
Tabel 12	25
Tabel 13	27
Tabel 14	28
Tabel 15	29
Tabel 16	29
Tabel 17	31
Tabel 18	31
Tabel 19	32
Tabel 20	33



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel 21	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	34
Tabel 22	Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	34
Tabel 23	Mutasi Persediaan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 s.d. 31 Desember 2020.....	35
Tabel 24	Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020.....	36
Tabel 25	Pembelian Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2020.....	36
Tabel 26	Pengembangan Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2020....	37
Tabel 27	Rincian Berita Acara Penghentian BMN Per 31 Desember 2020.....	37
Tabel 28	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2020....	38
Tabel 29	Mutasi Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2020.....	39
Tabel 30	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020.....	41
Tabel 31	Mutasi Aset Tak Berwujud s.d. 31 Desember 2020.....	41
Tabel 32	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain s.d 31 Desember 2020.....	42
Tabel 33	Rincian Reklasifikasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020.....	43
Tabel 34	Rincian ATB yang Dihapuskan per 31 Desember 2020.....	44
Tabel 35	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020.....	44
Tabel 36	Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019...	45
Tabel 37	Realisasi Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.....	48
Tabel 38	Rincian Ralat SPM Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.....	48
Tabel 39	Rincian Beban Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	49
Tabel 40	Rincian Beban Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	49
Tabel 41	Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	50
Tabel 42	Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	51



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel 43	Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	51
Tabel 44	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	52
Tabel 45	Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	52
Tabel 46	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.....	56
Tabel 47	Rincian BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2020.....	58
Tabel 48	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel s.d. 31 Desember 2020.....	58



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR GRAFIK**

Hal

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto pada 31 Desember 2020 .....	28
--	----

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.669.166.886 dan telah disetor ke kas negara. Tahun anggaran 2020 Sekretariat Kabinet tidak menentukan estimasi pendapatan, karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya pada Sekretariat Kabinet antara lain berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp231.593.164.881 atau mencapai 92,29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp250.941.188.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.176.806.623 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.738.501.654; Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.579.379.839; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp858.925.130. Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp7.628.608.467 dan Rp10.548.198.156.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp235.838.085.976, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp235.838.085.976). Pendapatan dan Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp89.010.999 dan Rp90.479.764. Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp598.842.251 dan Rp82.722.157. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah masing-masing sebesar Rp514.651.329 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp235.323.434.647).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp28.635.585.480, dan perubahan ekuitas yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah menurun sebesar (Rp18.087.387.324), sehingga nilai ekuitas akhir adalah Rp10.548.198.156. Perubahan ekuitas tersebut berasal dari selisih antara Defisit Laporan Operasional sebesar (Rp235.323.434.647) ditambah dengan Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp21.831.890) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp217.257.879.213.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**SEKRETARIAT KABINET**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Uraian	Catatan	2020		% thd Anggaran	2019
		Anggaran	Realisasi (Neto)		
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1,669,166,886	-	2,159,553,879
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>1,669,166,886</b>	<b>0.00</b>	<b>2,159,553,879</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	168,353,570,000	156,767,267,155	93.12	187,803,258,777
Belanja Barang	B.4	80,858,159,000	73,130,038,326	90.44	175,320,530,906
Belanja Modal	B.5	1,729,459,000	1,695,859,400	98.06	24,347,339,539
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>250,941,188,000</b>	<b>231,593,164,881</b>	<b>92.29</b>	<b>387,471,129,222</b>

Jakarta, 27 April 2021

Sekretaris Kabinet,



Fransono Anung

**SEKRETARIAT KABINET  
NERACA  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.793.096.739	3.272.809.348
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	1.035.224.316
Persediaan	C.3	2.945.404.915	3.466.775.929
Jumlah Aset Lancar		4.738.501.654	7.774.809.593
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.4	54.657.316.543	64.892.159.254
Aset Tetap Lainnya	C.5	742.783.023	11.207.596.930
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6	98.500.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(42.919.219.727)	(45.993.304.559)
Jumlah Aset Tetap		12.579.379.839	30.106.451.625
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.8	3.700.317.683	3.671.760.383
Aset Lain-Lain	C.9	305.900.000	6.922.173.376
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(3.147.292.553)	(9.876.605.894)
Jumlah Aset Lainnya		858.925.130	717.327.865
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>18.176.806.623</b>	<b>38.598.589.083</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	5.835.511.728	6.690.194.255
Uang Muka dari KPPN	C.12	1.793.096.739	3.272.809.348
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.628.608.467	9.963.003.603
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>7.628.608.467</b>	<b>9.963.003.603</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.13	10.548.198.156	28.635.585.480
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>10.548.198.156</b>	<b>28.635.585.480</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>18.176.806.623</b>	<b>38.598.589.083</b>

Jakarta, 27 April 2021

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT KABINET  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1	-	4.486.020
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	4.486.020
<b>BEBAN</b>	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	155.912.584.628	186.346.085.318
Beban Persediaan	D.2.2	5.195.588.687	6.033.820.008
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	49.109.530.429	73.825.845.746
Beban Pemeliharaan	D.2.4	6.780.248.709	5.330.754.713
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	12.369.336.288	87.667.207.397
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	6.470.797.235	7.097.811.499
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		235.838.085.976	366.301.524.681
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(235.838.085.976)	(366.297.038.661)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.3		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	89.010.999	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	90.479.764	244.760.544
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1.468.765)	(244.760.544)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	598.842.251	82.500.307
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	82.722.157	34.352.514
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		516.120.094	48.147.793
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		514.651.329	(196.612.751)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(235.323.434.647)	(366.493.651.412)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	D.4	(235.323.434.647)	(366.493.651.412)

Jakarta, 27 April 2021  
Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT KABINET  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
EKUITAS AWAL	E.1	28.635.585,480	9.350.205,098	19.285.380,382	206,26
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(235.323.434,647)	(366.493.651,412)	131.170.216,765	(35,79)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.3	(21.831.890)	66.129.920	(87.961.810)	(133,01)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	66.129.920	(66.129.920)	(100,00)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	-	401.537.400	(401.537.400)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(21.831.890)	(401.537.400)	379.705.510	(94,56)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	217.257.879,213	385.712.901,874	(168.455.022,661)	(43,67)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(18.087.387,324)	19.285.380,382	(37.372.767,706)	(193,79)
EKUITAS AKHIR	E.5	10.548.198,156	28.635.585,480	(18.087.387,324)	(63,16)

Jakarta, 27 April 2021

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Kabinet

*Dasar Hukum Entitas dan  
Rencana Strategis*

Sekretariat Kabinet RI (Setkab) adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Entitas berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat.

Dasar hukum pendirian entitas adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden ;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
6. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

- Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
7. Penyelenggaraan dukungan teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
  8. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
  9. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
  10. Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
  11. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
  12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Kabinet berkomitmen dengan visi ***“Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Sekretariat Kabinet yaitu “Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui:

1. Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien dan responsif;
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.”

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan terdiri atas Wakil

Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Administrasi, Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Staf Ahli, Inspektorat, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Pusat Pembinaan Penerjemah dengan rincian sebagai berikut:

1. Wakil Sekretaris Kabinet

Bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Deputi Bidang Perekonomian

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi.

6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan

bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

7. **Deputi Bidang Administrasi**

Bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

8. **Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat

9. **Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan hukum

10. **Staf Ahli Bidang Komunikasi**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi

11. **Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi

12. **Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional**

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman, investasi, dan hubungan internasional

13. **Staf Khusus Sekretaris Kabinet**

Bertanggung jawab untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet yang bukan

merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet.

14. Inspektorat

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

15. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

16. Pusat Pembinaan Penerjemah

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah.

Jumlah satker yang ada pada Sekretariat Kabinet adalah 1 (satu) satker.

Ringkasan data umum Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	:	Sekretariat Kabinet (114)
Unit Organisasi	:	Sekretariat Kabinet (114)
Provinsi	:	DKI Jakarta
Satuan Kerja	:	Sekretariat Kabinet (114.01)
Kode Bagian Anggaran	:	114
Kode Satker	:	403112
Alamat	:	Jalan Veteran No. 18 Jakarta Pusat

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Sekretariat Kabinet juga memberikan dukungan administrasi kepada Utusan Khusus Presiden/Staf Khusus Presiden/Staf Khusus Wakil Presiden (UKP/SKP/SKWP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden

dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua (2019-2024), Presiden Joko Widodo telah mengangkat 14 orang SKP dan 9 orang SKWP, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada pengangkatan UKP seperti pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang pertama (2014-2019). Pengangkatan SKP/SKWP tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, Keputusan Presiden Nomor 161/TPA sampai dengan 168/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden, Keputusan Presiden Nomor 133/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, Keputusan Presiden Nomor 91/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden.

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pengurangan 2 (dua) orang Staf Khusus Presiden karena mengundurkan diri dan penambahan 1 (satu) orang Staf Khusus Wakil Presiden. Dua Staf Khusus Presiden yang mengundurkan diri tersebut adalah Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan, sedangkan penambahan 1 (satu) Staf Khusus Wakil Presiden adalah Dr. Bambang Widianto. Rincian SKP dan SKWP periode 2019-2024 sampai dengan 31 Desember 2020 yang mendapatkan dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

- Staf Khusus Presiden
  1. Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho
  2. Staf Khusus Presiden Muhammad Fadjroel Rachman
  3. Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana
  4. Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit
  5. Staf Khusus Presiden Arif Budimanta
  6. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia

- Pendekatan Penyusunan  
Laporan Keuangan*
- 7. Staf Khusus Presiden Diaz Faisal Malik Hendropriyono
  - 8. Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf
  - 9. Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono
  - 10. Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi
  - 11. Staf Khusus Presiden Putri Indahsari Tanjung
  - 12. Staf Khusus Presiden Gracia Billy Mambrasar
  - Staf Khusus Wakil Presiden
    - 1. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Masyukri Abdillah
    - 2. Staf Khusus Wakil Presiden Drs. Masduki Baidlowi
    - 3. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
    - 4. Staf Khusus Wakil Presiden Robikin Emhas, S.H., M.H.
    - 5. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Lukmanul Hakin, M. Si.
    - 6. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Sukriansyah S. Latief, S.H., M.H
    - 7. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
    - 8. Staf Khusus Wakil Presiden Drs. Muhammad Imam Aziz
    - 9. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Bambang Widianto

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



### A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Kabinet menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Kabinet dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Sekretariat Kabinet adalah Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

##### b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak seni.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai



dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a) Tanah;
  - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **(6) Kewajiban**

*Kewajiban*

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7) Ekuitas**

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## A.6. PENJELASAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

### a. Capaian Output Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Output Strategis Tahun 2020

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Penyerapan	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output	
1	5015.001	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri	431.299.000	431.173.189	99,97%	117	Rancangan Rekomendasi	120	100%
2	5016.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	703.553.000	697.606.525	99,15%	185	Rancangan Rekomendasi	236	100%
3	5017.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Hubungan Internasional	452.661.000	439.645.118	97,12%	150	Rancangan Rekomendasi	150	100%
4	5018.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	394.266.000	393.813.350	99,89%	67	Rancangan Rekomendasi	67	100%
5	5019.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	355.344.000	349.780.467	98,43%	168	Rancangan Rekomendasi	168	100%
6	5020.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	657.501.000	649.934.827	98,85%	201	Rancangan Rekomendasi	201	100%
7	5021.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	351.590.000	349.463.872	99,40%	164	Rancangan Rekomendasi	164	100%
8	5022.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	322.983.000	319.843.832	99,03%	187	Rancangan Rekomendasi	187	100%
9	5023.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Agama, Keselamatan, Pemuda, dan Olahraga	302.608.000	271.758.726	89,81%	85	Rancangan Rekomendasi	100	100%
10	5024.001	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	279.414.000	245.652.227	87,92%	50	Rancangan Rekomendasi	50	100%
11	5025.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	272.925.000	256.769.788	94,08%	50	Rancangan Rekomendasi	53	100%
12	5026.001	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	298.602.000	288.417.904	96,59%	41	Rancangan Rekomendasi	45	100%
13	5827.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan Perikanan	328.626.000	280.097.392	85,23%	61	Rancangan Rekomendasi	61	100%
14	5828.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.083.218.000	865.660.725	79,92%	126	Rancangan Rekomendasi	185	100%
15	5829.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perhubungan	386.754.000	363.990.495	94,11%	72	Rancangan Rekomendasi	72	100%
16	5830.001	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Likungan Maritim	329.458.000	262.168.419	79,58%	65	Rancangan Rekomendasi	65	100%
17	4980.001	Layanan penyampaian sidang kabinet	4.147.574.000	4.049.713.321	97,64%	50	Layanan	50	100%
18	4981.001	Transkripsi sidang kabinet	1.324.862.000	1.323.270.500	99,88%	50	Dokumen	50	100%
19	4981.002	Rancangan risalah sidang Kabinet serta Arahan Presiden	764.626.000	745.216.925	97,46%	100	Dokumen	100	100%
20	4982.001	Naskah kepresidenan	345.880.000	334.720.900	96,77%	80	Naskah	80	100%
21	4982.002	Dokumen terjemahan	99.642.000	97.741.000	98,09%	300	Dokumen	300	100%
22	4982.003	Layanan pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pemerintah	850.978.000	827.672.320	97,26%	2	Layanan	2	100%
23	4983.001	Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi	879.351.000	842.866.730	95,85%	1	Layanan	1	100%
24	4983.002	Layanan Protokoler	598.460.000	577.434.793	96,49%	1	Layanan	1	100%

b. *Refocussing* Kegiatan/Realokasi anggaran

Untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian APBN TA 2020, dilaksanakan *refocussing* atau relokasi anggaran Sekretariat Kabinet sejumlah Rp45.617.851.000 atau sebesar 15,4 persen dari alokasi anggaran awal tahun sebesar Rp296.559.039.000. Dengan demikian, alokasi anggaran Sekretariat Kabinet yang digunakan untuk melaksanakan kegiatannya pada TA 2020 adalah sebesar Rp250.941.188.000 atau 84,6 persen dari alokasi anggaran awal tahun. Setelah dilakukan penyesuaian pagu anggaran dalam rangka penghematan (APBN-P) dan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, Sekretariat Kabinet beberapa kali melakukan revisi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Revisi terakhir mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp5.248.982.000 untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan akun-akun khusus sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Rincian anggaran, realisasi anggaran dan sisa anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 8 Realisasi Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020**

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521131	Beban Barang Operasinal - Penanganan Pandemi COVID-19	869.364.000	731.327.250	138.036.750	84,12
521241	Beban Barang Non Operasinal - Penanganan Pandemi COVID-19	51.305.000	35.363.500	15.941.500	68,93
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	42.200.000	37.670.000	4.530.000	89,27
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.067.883.000	3.039.780.800	1.028.102.200	74,73
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	218.230.000	156.757.390	61.472.610	71,83
<b>JUMLAH</b>		<b>5.248.982.000</b>	<b>4.000.898.940</b>	<b>1.248.083.060</b>	<b>76,22</b>

Alokasi anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 pada anggaran Sekretariat Kabinet berasal dari revisi/relokasi anggaran Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Honor Output Kegiatan (521213), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

(524113) dan Belanja Barang Lainnya.

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Sekretariat Kabinet merealisasikan anggaran pandemi COVID-19 yang telah dianggarkan untuk pengadaan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *Rapid Test/SWAB PCR* bagi pegawai dengan status ODP (orang Dalam Pemantauan), dan keluarga pegawai yang terkonfirmasi positif pandemi COVID-19.
  2. Pengadaan Anti Corona Kit bagi para pegawai dilingkungan Sekretariat Kabinet (*Hand sanitizer, Masker/Face shield*).
  3. Pengadaan Jamuan Penambah Daya Tahan Tubuh bagi Pejabat/Pegawai yang melaksanakan WFO selama masa pandemi COVID-19.
  4. Pengadaan Barang Persediaan berupa Isi Ulang *Hand Sanitizer* dan Sarung Tangan Latex.
  5. Penyemprotan Disinfektan Ruang Kerja secara rutin di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.
  6. Pembayaran biaya komunikasi bagi pegawai yang melaksanakan WFO selama masa pandemi COVID-19
  7. Pengadaan vaksin influenza untuk pegawai dan suntik vitamin C untuk meningkatkan imunitas pegawai.
  8. Swab/PCR Tes bagi Pegawai Setkab terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet.
  9. Pembayaran honor narasumber *Focus Group Discussion (FGD)* secara daring (dengan jaringan) dengan tema penanganan pandemi COVID-19.
  10. Perjalanan dinas yang masih terkait dalam penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Selain itu, selama pandemi COVID-19, Sekretariat Kabinet juga menerbitkan peraturan internal dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain:
1. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 1 Tahun 2020 Pemberian Layanan SWAB/PCR TEST bagi Pegawai Sekretariat Kabinet dan Keluarga dalam Masa Pandemi COVID-19.
  2. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

3. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
4. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
5. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Biaya/Belanja yang Dapat Diberikan pada DIPA Satker Sekretariat Kabinet Dalam Masa Darurat COVID-19.
6. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam Tatapan Normal Baru.
7. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Video Conference dalam Penyelenggaraan Rapat/Pertemuan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
8. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 9 Tahun 2020 Pemberian Layanan SWAB/PCR TEST bagi Pegawai Sekretariat Kabinet dan Keluarga dalam Masa Pandemi COVID-19.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Pagu Anggaran  
Rp250.941.188.000

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020 semula adalah sebesar Rp296.559.039.000. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilakukan beberapa kali revisi anggaran dengan jumlah anggaran sesuai revisi terakhir adalah sebesar Rp250.941.188.000. Penurunan jumlah anggaran ini dilakukan di bulan Mei 2020, sehubungan dengan adanya kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang berdampak pada pengurangan anggaran belanja di beberapa Kementerian dan Lembaga. Adapun pagu anggaran berdasarkan jenis

belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	31 Desember 2020	
	Awal	Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	168.353.570.000	168.353.570.000
Belanja Barang	126.648.810.000	80.858.159.000
Belanja Modal	1.556.659.000	1.729.459.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>296.559.039.000</b>	<b>250.941.188.000</b>

Perubahan alokasi anggaran dalam DIPA Sekretariat Kabinet sesuai dengan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-140/Seskab /Adm/04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DIPA Sekretariat Kabinet TA 2020 untuk Percepatan Penanganan COVID-19. Penyesuaian tersebut mengakibatkan pengurangan anggaran belanja Sekretariat Kabinet sebesar Rp45.617.851.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perubahan Penghematan Pagu Anggaran

AKUN	URAIAN	Semula	Menjadi	Penghematan
5211	Belanja Barang Operasional	23.263.295.000	18.781.399.000	4.481.896.000
5212	Belanja Barang Non Operasional	16.689.654.000	9.429.266.000	7.260.388.000
5218	Belanja Persediaan	3.081.579.000	3.004.349.000	77.230.000
5221	Belanja Jasa	21.032.909.000	25.407.050.000	(4.374.141.000)
5231	Belanja Pemeliharaan	10.404.855.000	9.808.664.000	596.191.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.087.707.000	13.657.442.000	25.430.265.000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	13.088.811.000	769.989.000	12.318.822.000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.000.000	1.575.459.000	(307.459.000)
5361	Belanja Modal Lainnya	288.659.000	154.000.000	134.659.000
<b>JUMLAH</b>	<b>128.205.469.000</b>	<b>82.587.618.000</b>	<b>45.617.851.000</b>	

Setelah dilakukan penyesuaian pagu anggaran dalam rangka penghematan (APBN-P), Sekretariat Kabinet melakukan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan melakukan beberapa kali revisi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Revisi terakhir mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp5.248.982.000 untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan akun-akun khusus sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 11 Rincian Pagu Belanja Barang Untuk Penanganan Pandemi COVID-19**

AKUN	URAIAN	Anggaran
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	869.364.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	51.305.000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid 19	42.200.000
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	4.067.883.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Covid 19	218.230.000
<b>JUMLAH</b>		<b>5.248.982.000</b>

Dengan adanya penghematan dan *refocussing* anggaran berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas dalam dan luar negeri, paket *meeting* dalam kota dan luar kota, dan juga perubahan pelaksanaan kegiatan menggunakan metode daring (dalam jaringan) yang memanfaatkan komputer dan internet.

Lebih lanjut, terdapat perubahan alokasi anggaran belanja barang dan belanja modal setelah APBN-P yang disebabkan oleh adanya kebutuhan belanja modal terkait pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Tahun 2021 (536111) dan pengadaan IP *Address Management* (532111) yang berasal dari pemanfaatan sisa anggaran kegiatan swakelola sebesar Rp200.000.000. Usulan pergeseran anggaran ini sesuai dengan surat Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: B.0488/Adm/09/2020, tanggal 30 September 2020 tentang Usulan Revisi Anggaran dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Nomor: S-101/AG/AG.4/2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan program, jumlah anggaran Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

**Tabel 12 Pagu Anggaran Berdasarkan Program**

PROGRAM	31 Desember 2020	
	Awal	Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet (01)	242.219.466.000	230.211.041.000
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan (06)	54.339.573.000	20.730.147.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>296.559.039.000</b>	<b>250.941.188.000</b>



## B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.669.166.886 dan Rp2.159.553.879. Sekretariat Kabinet tidak menentukan estimasi pendapatan, karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Namun, pada tahun berjalan terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan Pendapatan Lain-Lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai, Barang dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 22,71 persen dibandingkan TA 2019. Penurunan tersebut berupa penurunan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Penurunan pendapatan tersebut disebabkan telah terlaksananya penerapan sistem monitoring terkait percepatan pertanggungjawaban dan pengembalian sisa belanja perjalanan dinas yang dilakukan setiap triwulan di Sekretariat Kabinet. Berikut rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2020:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.010.999 yang terdiri dari:
  - a. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.000.999 berupa penjualan satu paket peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat sebanyak 905 unit melalui lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 50/26/2020 tanggal 30 Januari 2020. Lelang ini dilaksanakan dengan sistem *E-Auction* oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II pada tanggal 30 Januari 2020.
  - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.010.000 berupa penjualan satu paket peralatan dan mesin dan barang persediaan yang kondisinya rusak berat melalui lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 561/26/2020, tanggal 18 November 2020. Lelang ini dilaksanakan dengan sistem *E-Auction* oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jakarta II pada tanggal 18 November 2020.

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp4.486.020 merupakan sanksi finansial berupa denda yang dikenakan kepada penyedia jasa renovasi ruang kerja lantai 3 dan 4, Gedung III, dan penyedia barang untuk kelengkapan ruangan hasil renovasi, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari waktu yang ditentukan sesuai kontrak.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp5.003.414 berupa penyetoran kelebihan pembayaran gaji, uang makan, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan tunjangan kinerja pegawai.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.476.354.511 berupa penyetoran kelebihan pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
5. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp94.311.942 berupa kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa renovasi ruang kerja lantai 3 dan 4 serta lantai 3 sayap selatan, Gedung III, karena terdapat penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 13 Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir  
Pada 31 Desember 2020 dan 2019**

Akun	Uraian	2020	2019	Naik (Turun) %
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	89.010.999	0	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.486.020	0	-
<b>Jumlah Pendapatan Pengelolaan BMN</b>		<b>93.497.019</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5.003.414	179.142.673	-97,21
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.476.354.511	1.980.411.206	-25,45
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	94.311.942	0	-
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>		<b>1.575.669.867</b>	<b>2.159.553.879</b>	<b>-27,04</b>
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>		<b>1.669.166.886</b>	<b>2.159.553.879</b>	<b>-22,71</b>

Realisasi Belanja  
Rp231.735.581.236

## B.2 Belanja

Realisasi belanja bruto pada 31 Desember 2020 sebesar Rp231.735.581.236 atau 92,35 persen dari anggaran belanja sebesar Rp250.941.188.000. Pengembalian



belanja sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp142.416.355 sehingga realisasi belanja neto Sekretariat Kabinet pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp231.593.164.881 atau sebesar 92,29 persen dari anggaran belanja. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengembalian belanja barang berupa pengembalian belanja keperluan perkantoran, pengembalian belanja barang operasional lainnya, pengembalian belanja perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020**

Uraian	31 Desember 2020					
	Anggaran	Realisasi Bruto	%	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai	168.353.570.000	156.885.875.086	93,19	118.607.931	156.767.267.155	93,12
Belanja Barang	80.858.159.000	73.153.846.750	90,47	23.808.424	73.130.038.326	90,44
Belanja Modal	1.729.459.000	1.695.859.400	98,06	0	1.695.859.400	98,06
Jumlah	250.941.188.000	231.735.581.236	92,35	142.416.355	231.593.164.881	92,29

Dalam bentuk grafik, komposisi anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

**Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto pada 31 Desember 2020**

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2020**



Realisasi belanja pada 31 Desember 2020 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2020

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETO	% Neto
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet (01)	230.211.041.000	212.498.987.095	132.542.715	212.366.444.380	92,25
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan (06)	20.730.147.000	19.236.594.141	9.873.640	19.226.720.501	92,75
<b>JUMLAH</b>	<b>250.941.188.000</b>	<b>231.735.581.236</b>		<b>142.416.355</b>	<b>231.593.164.881</b> <b>92,29</b>

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	156.767.267.155	187.803.258.777	-16,53
Belanja Barang	73.130.038.326	175.320.530.906	-58,29
Belanja Modal	1.695.859.400	24.347.339.539	-93,03
<b>JUMLAH</b>	<b>231.593.164.881</b>	<b>387.471.129.222</b>	<b>-40,23</b>

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan 40,23 persen dari realisasi belanja periode yang sama tahun 2019. Hal tersebut sehubungan dengan adanya *refocussing* dan realokasi kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berdampak pada penghematan anggaran belanja di beberapa Kementerian dan Lembaga. Realisasi belanja yang tidak maksimal disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Penurunan Belanja Pegawai karena adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya TA 2020 hanya diberikan kepada PNS level Eselon III kebawah berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat tidak termasuk tunjangan kinerja. Disamping itu, adanya penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH) dan pembatasan uang lembur dan uang makan lembur bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 juga menyebabkan turunnya penyerapan belanja pegawai.

2. Penurunan Belanja Barang karena adanya penurunan volume kegiatan perjalanan dinas dalam rangka melakukan studi banding, menghadiri konferensi, seminar, penyuluhan, serta pengadaan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehubungan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB transisi selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona. Selain itu, adanya penghematan/pemotongan anggaran yang menyebabkan penurunan belanja barang operasional, belanja barang non operasional, serta belanja jasa.
3. Penurunan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 terjadi sejalan dengan penurunan alokasi anggaran pada belanja modal TA 2020.

*Belanja Pegawai  
Rp156.767.267.155*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp156.767.267.155 dan Rp187.803.258.777 atau mengalami penurunan 16,53 persen dari realisasi belanja pegawai periode yang sama tahun 2019. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan Tunjangan Hari Raya TA 2020 hanya kepada PNS level Eselon III kebawah berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat, tidak termasuk tunjangan kinerja. Disamping itu, adanya penerapan kebijakan WFH dan pembatasan uang lembur dan makan lembur bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 juga menyebabkan turunnya penyerapan belanja pegawai. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**

AKUN	URAIAN	2020	2019	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	35.064.539.327	36.690.068.499	-4,43
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	(19.087.440)	(20.118.440)	-5,12
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	210.000.000	175.000.000	20,00
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00
5122	Belanja Lembur	366.125.000	1.351.069.000	-72,90
	Pengembalian Belanja Lembur	0	0	0,00
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	121.245.210.759	149.608.224.948	-18,96
	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	(99.520.491)	(985.230)	-
<b>JUMLAH</b>		<b>156.767.267.155</b>	<b>187.803.258.777</b>	<b>-16,53</b>

*Belanja Barang  
Rp73.130.038.326*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp73.130.038.326 dan Rp175.320.530.906 atau mengalami penurunan 58,29 persen dari realisasi belanja barang periode yang sama tahun lalu. Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan adanya penurunan volume kegiatan perjalanan dinas dalam rangka melakukan studi banding, menghadiri konferensi, seminar, penyuluhan, serta pengadaan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Selain itu, adanya larangan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona yang menyebabkan penurunan belanja barang operasional, belanja barang non operasional serta belanja jasa.

**Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**

Akun	URAIAN	2020	2019	Naik/(Turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	17.752.427.745	24.271.844.716	(6.519.416.971)	-26,86
5211	Pengembalian Belanja Barang Operasional	(9.278.784)	(158.948.112)	149.669.328	-
5212	Belanja Barang Non Operasional	7.628.356.124	23.634.355.254	(16.005.999.130)	-67,72
5218	Belanja Barang Persediaan	2.635.348.000	4.784.082.600	(2.148.734.600)	-44,91
5221	Belanja Jasu	23.743.921.344	26.592.340.988	(2.848.419.644)	-10,71
5231	Belanja Pemeliharaan	9.009.927.609	7.500.599.099	1.509.328.510	20,12
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.772.634.145	68.458.338.154	(56.685.704.009)	-82,80
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	(14.529.640)	(1.686.428.651)	1.671.899.011	-99,14
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	611.231.783	24.494.696.645	(23.883.464.862)	-97,50
5242	Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	(2.570.349.787)	2.570.349.787	-
<b>JUMLAH</b>		<b>73.130.038.326</b>	<b>175.320.530.906</b>	<b>(102.190.492.580)</b>	<b>-58,19</b>

Dari jumlah realisasi belanja barang tersebut, terdapat kesalahan penggunaan realisasi MAK Belanja Barang sebesar Rp166.848.750 yang seharusnya menggunakan MAK Belanja Modal. Hal tersebut sesuai dengan jurnal koreksi



BPK sebagaimana terlampir pada Daftar Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet *Audited* untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Sekretariat Kabinet telah mengalokasikan anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp5.248.982.000 (rincian anggaran terdapat pada Tabel 9). Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat realisasi anggaran atas belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.000.898.940 atau 76,22 persen. Rincian realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 19 Realisasi Belanja Barang (Akun Covid) untuk Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020**

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	869.364.000,00	731.327.250,00	84,12
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	51.305.000,00	35.363.500,00	68,93
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	42.200.000,00	37.670.000,00	89,27
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	4.067.883.000,00	3.039.780.800,00	74,73
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	218.230.000,00	156.757.390,00	71,83
<b>JUMLAH</b>		<b>5.248.982.000</b>	<b>4.000.898.940</b>	<b>76,22</b>

Langkah mitigasi yang sudah dilakukan untuk mengurangi salah saji terkait pengungkapan akun/transaksi untuk penanganan pandemi COVID-19 antara lain:

1. Melakukan revisi anggaran dan koreksi transaksi pengeluaran yang sudah terjadi terkait penanganan pandemi COVID-19 yang sudah terbit SPM/SP2D sampai dengan periode pelaporan.
2. Melakukan pemutakhiran data revisi pada seluruh aplikasi yang digunakan. Hal tersebut dilakukan agar penganggaran dan pembebanan akun khusus COVID-19 menjadi akurat dan akuntabel.

*Belanja Modal  
Rp1.695.859.400*

## **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.695.859.400 dan Rp24.347.339.539. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 atau mengalami penurunan sebesar 93,03

persen dibandingkan realisasi belanja modal periode yang sama tahun lalu

**Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019**

AKUN	URAIAN	2020	2019	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.545.426.000	13.396.899.600	(88,46)
5361	Belanja Modal Lainnya	150.433.400	10.950.439.939	(98,63)
Jumlah belanja kotor		1.695.859.400	24.347.339.539	(93,03)
Pengembalian belanja modal		0	0	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.695.859.400</b>	<b>24.347.339.539</b>	<b>(93,03)</b>

Penurunan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 terjadi sejalan dengan penurunan alokasi anggaran pada belanja modal TA 2020. Realisasi belanja modal pada tahun 2020 tersebut direalisasikan untuk pembelian berupa alat pendukung kegiatan sidang kabinet melalui *video conference*, alat *audio to text*, garuda bahan logam, mesin hitung uang, *ice board display screen*, *video conference cam*, dan tempat tidur. Sampai dengan 31 Desember 2020, tidak terdapat anggaran belanja modal yang dialihkan anggaran percepatan penanganan pandemi COVID-19.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp1.793.096.739*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.793.096.739 dan Rp3.272.809.348 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Pada awal tahun 2021, sebagian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp206.378.739 pada tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor NTPN 28A1C48VUIFKJFFC dan NTB 000000122401. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.586.718.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan awal tahun 2021. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-5843/WPB.12/2020, tanggal 18 Desember 2020, hal Persetujuan Dispensasi Penggunaan Sisa Dana UP TA 2020 yang Diperhitungkan dengan Penerimaan UP TA 2021 Satker Sekretariat Kabinet (403112). Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai

berikut:

Tabel 21 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
Uang Tunai	1.171.888.932	3.272.809.348
Rekening Bank (UP)	621.207.807	-
Uang Muka	-	-
Kuitansi	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>1.793.096.739</b>	<b>3.272.809.348</b>

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.035.224.316. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Penurunan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut karena seluruh pungutan pajak dan pengembalian belanja telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebelum tanggal 31 Desember 2020.

Persediaan  
Rp 2.945.404.915

### C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.945.404.915 dan Rp3.466.775.929. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sumber perolehan persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 seluruhnya berasal dari pembelian. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019

JENIS PERSEDIAAN	2020	2019
Barang Konsumsi	2.851.349.815	3.244.433.079
Barang untuk Pemeliharaan	84.755.100	96.892.850
Bahan Baku	9.300.000	125.450.000
<b>JUMLAH</b>	<b>2.945.404.915</b>	<b>3.466.775.929</b>

Nilai persediaan pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp521.371.014 dibandingkan tahun 2019. Penurunan nilai persediaan tersebut disebabkan adanya *refocussing* dan realokasi kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berdampak pada penghematan anggaran belanja di beberapa Kementerian dan Lembaga termasuk Sekretariat Kabinet. Selain itu,

pemakaian atas persediaan tersebut juga mengalami penurunan akibat kebijakan WFH bagi pejabat/pegawai selama masa pandemi COVID-19.

Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat mutasi tambah berupa pembelian atas Persediaan Barang untuk pemeliharaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp42.521.000. Sedangkan mutasi kurang berupa pemakaian atas Persediaan barang untuk pemeliharaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp32.050.400. Saldo akhir persediaan barang untuk pemeliharaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp10.470.600. Rincian mutasi tambah dan kurang persediaan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 23 Mutasi Persediaan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 s.d. 31 Desember 2020**

No.	Akun	Nama Barang	Volume	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir	Nomor SPM	Nomor SP2D
1	521111	Hand Sanitizer dan Cairan Isi Ulang Hand Sanitizer	700 botol dan 42 galon	35.770.000	28.400.000	7.370.000	80136	200181701000879
2	521841	Sarung Tangan Latex	10 Box	1.900.000	1.710.000	190.000	80197	200181701004760
3	522192	Disinfektan Anti Virus dan Disinfektan Spray	120 Kaleng	4.851.000	1.940.400	2.910.600	80217	200181701006363
<b>JUMLAH</b>				<b>42.521.000</b>	<b>32.050.400</b>	<b>10.470.600</b>		

Berdasarkan tabel 23 di atas, Sekretariat Kabinet telah melakukan jurnal penyesuaian/umum secara manual pada aplikasi SAIBA terhadap kesalahan penggunaan akun sebesar Rp4.851.000 yang berupa pembelian Disinfektan Anti Virus dan Disinfektan Spray masing-masing sebanyak 60 kaleng pada SPM Nomor 80217 yang semula dibebankan sebagai akun belanja jasa penanganan pandemi COVID-19 (522192) menjadi akun persediaan penanganan pandemi COVID-19 (521841).

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor: 02/Setkab/OF/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020.

*Peralatan dan Mesin  
Rp54.657.316.543*

#### **C.4 Peralatan dan Mesin**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.657.316.543 dan Rp64.892.159.254. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24 Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp	64.892.159.254
Mutasi tambah:		2.473.256.950
Pembelian		1.667.311.250
Koreksi Pencatatan Nilai		707.907.200
Pengembangan Nilai Aset		46.008.500
Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap		52.030.000
Mutasi kurang:		(12.708.099.661)
Penghentian Aset dari penggunaan		(8.055.919.661)
Transfer Keluar		(3.944.272.800)
Koreksi Pencatatan Nilai		(707.907.200)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>		<b>54.657.316.543</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020		(42.919.219.727)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>11.738.096.816</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.473.256.950 berasal dari:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.667.311.250 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Pembelian Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2020

No.	Nama Barang	Volume	Rupiah	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D
1	Interior Ruang Rapat Lantai 3 (Lift Projector Motorized, Instalasi Video Wall dan Controller Video Wall	4 Unit	46.585.000	80109	13 Mei 2020	200181303018286	15 Mei 2020
2	Alat Audio To Text	1 Paket	198.500.000	50230	19 Mei 2020	20018303019282	25 Mei 2020
3	Garuda Bahan Logam Mesin Hitung Uang	3 Buah	5.700.000	80116	28 Mei 2020	200181303020169	28 Mei 2020
4	Ice Board Display Screen Video Conference Cam	1 Unit	111.540.000		80121	3 Juni 2020	200181303020740
5	Tempat Tidur	1 Unit	16.720.000	80132	26 Juni 2020	20018701000559	30 Juni 2020
6	Flipchart Magnetic	1 Buah	4.900.000	80147	12 Agustus 2020	200181701001805	13 Agustus 2020
7	Alat Pendukung Video Conference	1 Paket	12.945.000	50241	10 Agustus 2020	200181701001733	12 Agustus 2020
8	Perangkat Audio dan Visual	1 Paket	686.952.000	50248	01 Oktober 2020	200181701003658	02 Oktober 2020
9	Screen Projector Motorized	1 Paket	17.600.000	80180	02 Oktober 2020	200181701003710	05 Oktober 2020
10	Perbaikan dan Penggantian Lemari Panty	1 Paket	71.211.250	80182	02 Oktober 2020	200181701003711	05 Oktober 2020
11	Alat Pendukung Proses Penyusunan Hasil Sidang Kabinet	1 Paket	96.498.000	50252	4 November 2020	200181701004918	5 November 2020
12	Internet Protocol Address Management (IP Address Management)	1 Paket	198.000.000	60042	01 Desember 2020	200181701006594	02 Desember 2020
13	Alat Pendukung Proses Penyusunan Hasil Sidang Kabinet	1 Paket	8.910.000	50261	31 Desember 2020	200181701009859	31 Desember 2020
<b>JUMLAH</b>			<b>1.667.311.250</b>				

2. Koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas berupa Meja Kerja Kayu sebesar Rp707.907.200. Koreksi ini disebabkan karena kekurangan pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi BMN yang semula sebesar Rp949.460.612 menjadi sebesar Rp1.657.367.812 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Nomor: BA.16/Setkab/BMN/08/2020, tanggal

24 Agustus 2020.

3. Pengembangan nilai aset sebesar Rp46.008.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Pengembangan Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2020

No.	Nama Barang	Volume	Rupiah	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D
1	Gromet Meja Meeting, Instalasi Power Meja Meeting dan Kabel Data Meja Meeting	84 Titik	24,832,500	80109	13 Mei 2020	200181303018286	15 Mei 2020
2	Microsoft Office Home and Business 2019 for Mac	2 Unit	8,856,000	50252	04 November 2020	200181701004918	05 November 2020
3	Pengembangan Nilai Aquarium Lantai 3 dan 4	1 Paket	12,320,000	80237	30 Desember 2020	20018701009480	31 Desember 2020
<b>JUMLAH</b>						<b>46.008.500</b>	

4. Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp52.030.000 berupa *Uninterruptible Power Supply* (UPS) sebanyak 1 Unit sesuai dengan Berita Acara Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Dari Penggunaan yang sudah dihentikan Penggunaannya Nomor: BA.22/Setkab/BMN/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020.

Sampai dengan 31 Desember 2020, seluruh realisasi pembelian Peralatan dan Mesin sebagaimana tersaji pada tabel di atas bukan ditujukan dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Mutasi kurang peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.708.099.661 berasal dari:

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp8.055.919.661 (BMN Intrakomptabel) yaitu Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki serta sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, sesuai Berita Acara Penghentian Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Berita Acara Penghentian BMN Per 31 Desember 2020

No.	Nomor Berita Acara	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Keterangan
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	
1	BA.06/Setkab/BMN/02/2020	5	890.104.000	-	-	Station Wagon
2	BA.08/Setkab/BMN/03/2020	6	1.452.276.000	-	-	Station Wagon
3	BA.09/Setkab/BMN/03/2020	75	834.961.308	-	-	Komputer Unit (PC)
4	BA.12/Setkab/BMN/05/2020	41	316.120.706	4	951.920	Peralatan Mesin, AC, Hub dll
5	BA.13/Setkab/BMN/06/2020	12	3.938.217.750	-	-	Alat Angkutan Darat Bermotor
6	BA.19/Setkab/BMN/09/2020	41	406.013.420	-	-	Peralatan Mesin
7	BA21/Setkab/BMN/09/2020	33	218.226.477	-	-	Alat Angkutan Darat Bermotor
<b>JUMLAH</b>			<b>8.055.919.661</b>		<b>951.920</b>	

2. Transfer keluar BMN berupa alih status BMN kepada Badan Pembinaan



Ideologi Pancasila (BPIP) senilai Rp3.947.072.800, yang terdiri atas BMN Intrakomptabel sebanyak 455 unit senilai Rp3.944.272.800 dan BMN Ekstrakomptabel sebanyak 11 unit senilai Rp2.800.000. Transfer keluar ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BAST-0001/Adm/04/2020, tanggal 20 April 2020.

3. Koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas berupa meja komputer sebesar Rp707.907.200. Koreksi ini disebabkan karena kelebihan pencatatan meja komputer yang merupakan bagian meja kerja kayu berdasarkan hasil inventarisasi BMN sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Nomor: BA.16/Setkab/BMN/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020.

Rincian mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin tersebut sesuai dengan klasifikasi BMN adalah sebagai berikut:

**Tabel 28 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2020**

NO	ASET TETAP (Peralatan dan Mesin)	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	Alat Bantu	615.854.740	-	-	615.854.740
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	22.100.521.092	-	6.280.597.750	15.819.923.342
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	19.228.058	-	-	19.228.058
4	Alat Bengkel Bermesin	10.725.000	-	-	10.725.000
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.170.000	-	-	1.170.000
6	Alat Ukur	3.450.000	-	-	3.450.000
7	Alat Kantor	4.963.106.292	532.411.650	470.292.000	5.025.225.942
8	Alat Rumah Tangga	10.335.894.272	904.894.300	1.597.501.173	9.643.287.399
9	Alat Studio	1.516.001.513	153.957.000	107.969.000	1.561.989.513
10	Alat Komunikasi	845.192.601	-	34.875.000	810.317.601
11	Peralatan Pemancar	5.700.000	-	-	5.700.000
12	Komputer Unit	12.435.038.101	312.194.000	3.109.920.248	9.637.311.853
13	Peralatan Komputer	12.040.277.585	569.800.000	1.106.944.490	11.503.133.095
<b>JUMLAH</b>		<b>64.892.159.254</b>	<b>2.473.256.950</b>	<b>12.708.099.661</b>	<b>54.657.316.543</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp742.783.023

### C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp742.783.023 dan Rp11.207.596.930. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp742.783.023. Aset Tetap Lainnya terdiri atas bahan perpustakaan, lukisan, serta barang bercorak kesenian. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 29 Mutasi Aset Tetap Lainnya s.d 31 Desember 2020**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp	11.207.596.930
Mutasi tambah:		23.376.100
Pembelian		23.376.100
Mutasi kurang:		(10.488.190.007)
Koreksi Pencatatan Nilai		(92.622.610)
Transfer Keluar		(10.089.667.397)
Penghentian Aset dari Penggunaan		(305.900.000)
Saldo per 31 Desember 2020		742.783.023
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020		-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	742.783.023

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.376.100 berasal dari pengadaan buku cetak sebanyak 27 buku sesuai dengan SPM Nomor 60053 tanggal 30 Desember 2020 dan SP2D Nomor 200181701009451 tanggal 31 Desember 2020. Penambahan atas pembelian Aset Tetap Lainnya tersebut bukan ditujukan dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Sedangkan mutasi kurang aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp10.488.190.007 terdiri dari:

1. Koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas ATR berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah disetorkan ke kas Negara pada TA 2020 sebesar Rp92.622.610 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas atas kekurangan volume atas pekerjaan renovasi lantai 3 sayap selatan Gedung III Sekretariat Kabinet sebesar Rp8.931.230 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Nomor: BA.17/Setkab/BMN/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020.
  - b. Koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas atas kekurangan volume atas pekerjaan renovasi ruangan kerja lantai 3 dan 4 Gedung III Sekretariat Kabinet sebesar Rp83.691.380 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nilai Nomor: BA.18/Setkab/BMN/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020.

2. Transfer Keluar Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi yang diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri dari Renovasi Lantai 3 dan Lantai 4 Gedung III Kementerian Sekretariat Negara dan Lantai 3 Sayap Selatan Gedung III Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp10.089.667.397 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: BAST-02/ADM/11/2020, tanggal 16 November 2020.
3. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa 1 Unit Video Film Cina di Betawi dan 1 Unit Video Film Sumba sebesar Rp305.900.000. Penghentian Aset dari Penggunaan tersebut berdasarkan jurnal koreksi dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dan memorandum Inspektur Nomor: M.0048/Insp/04/2021, tanggal 12 April 2021, perihal Hasil Kajian atas Aset Tetap berupa Video Hasil Kegiatan Tahun 2017 oleh UKP-PIP. Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti temuan dan kajian tersebut dengan melakukan koreksi pada aplikasi SIMAK-BMN.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp98.500.000*

### **C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp98.500.000 dan Rp0. KDP tersebut merupakan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Lantai Basement dan Lantai 1, Gedung III, Kantor Sekretariat Kabinet Jl Veteran No 18 Jakarta Pusat, sesuai dengan SPM Nomor 80245 tanggal 31 Desember 2020 dan SP2D Nomor 200181701009913 tanggal 31 Desember 2020. Pelaksanaan KDP ini belum selesai karena anggaran yang tersedia pada tahun 2020 hanya untuk pengadaan jasa konsultan perencana sedangkan untuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi renovasi ruangan Lantai 1 dan Basement dimaksud akan dilaksanakan pada tahun 2021.

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp42.919.219.727)*

### **C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp42.919.219.727) dan (Rp45.993.304.559). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang

disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Alat Bantu	615,854,740	370,582,027	245,272,713
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	15,819,923,342	15,753,623,692	66,299,650
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	19,228,058	19,228,058	-
4	Alat Bengkel Bermesin	10,725,000	8,043,750	2,681,250
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	1,170,000	819,000	351,000
6	Alat Ukur	3,450,000	3,450,000	-
7	Alat Kantor	5,025,225,942	3,544,411,317	1,480,814,625
8	Alat Rumah Tangga	9,643,287,399	4,731,305,593	4,911,981,806
9	Alat Studio	1,561,989,513	1,244,300,313	317,689,200
10	Alat Komunikasi	810,317,601	796,462,301	13,855,300
11	Peralatan Pemancar	5,700,000	1,995,000	3,705,000
12	Komputer Unit	9,637,311,853	7,834,845,685	1,802,466,168
13	Peralatan Komputer	11,503,133,095	8,610,152,991	2,892,980,104
<b>JUMLAH</b>		<b>54,657,316,543</b>	<b>42,919,219,727</b>	<b>11,738,096,816</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp3.700.317.683

### C.8 Aset Tak Berwujud (ATB)

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.700.317.683 dan Rp3.671.760.383. ATB pada Sekretariat Kabinet berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Nilai *software* adalah Rp3.170.643.683, sedangkan nilai lisensi adalah Rp529.674.000.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Mutasi Aset Tak Berwujud s.d 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp	3.671.760.383
Mutasi tambah:		28.557.300
Pembelian		28.557.300
Mutasi kurang:		-
Saldo per 31 Desember 2020		3.700.317.683
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020		3.147.292.553
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	553.025.130

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 berasal dari pembelian lisensi berupa pengadaan buku elektronik (*e-book*) sebesar

Rp28.557.300 sebanyak 1 paket sesuai dengan SPM Nomor 60037, tanggal 30 November 2020 dan SP2D Nomor 20018170106377, tanggal 1 Desember 2020. Penambahan atas pembelian pada Aset Tak Berwujud tersebut bukan ditujukan dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Sampai dengan 31 Desember 2020 tidak ada mutasi kurang untuk Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-Lain  
Rp305.900.000

### C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp305.900.000 dan Rp6.922.173.376. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat/usang dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Kabinet serta dalam proses penghapusan BMN. Rincian mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain s.d 31 Desember 2020

URAIAN	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	Nilai Aset Lain-Lain
Saldo per 31 Desember 2019	1,254,039,382	5,668,133,994	6,922,173,376
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>8,361,819,661</b>	<b>0</b>	<b>8,361,819,661</b>
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	8,361,819,661	0	8,361,819,661
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>9,309,959,043</b>	<b>5,668,133,994</b>	<b>14,978,093,037</b>
Usulan Barang Rusak Berat	9,257,929,043	0	9,257,929,043
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	52,030,000	0	
Penghapusan	0	5,668,133,994	5,668,133,994
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>305,900,000</b>	<b>0</b>	<b>305,900,000</b>

Sampai dengan periode 31 Desember 2020 terdapat mutasi tambah Aset Lain-Lain sebesar Rp8.361.819.661 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki, Aset Tetap Tidak Berwujud yang sudah tidak digunakan (usang), serta Aset Tetap Lainnya yang tidak mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Barang Milik Negara dari Penggunaan sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 33 Rincian Reklasifikasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020**

No.	Nomor Berita Acara	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Keterangan
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	
1	BA.06/Setkab/BMN/02/2020	5	890.104.000	-	-	Station Wagon
2	BA.08/Setkab/BMN/03/2020	6	1.452.276.000	-	-	Station Wagon
3	BA.09/Setkab/BMN/03/2020	75	834.961.308	-	-	Komputer Unit (PC)
4	BA.12/Setkab/BMN/05/2020	41	316.120.706	4	951.920	Peralatan Mesin, AC, Hub dll
5	BA.13/Setkab/BMN/06/2020	12	3.938.217.750	-	-	Alat Angkutan Darat Bermotor
6	BA.19/Setkab/BMN/09/2020	41	406.013.420	-	-	Peralatan Mesin
7	BA.21/Setkab/BMN/09/2020	33	218.226.477	-	-	Alat Angkutan Darat Bermotor
8	BA.26/Setkab/BMN/12/2020	2	305.900.000	-	-	Film Betawi Cina dan Film Sumba
<b>JUMLAH</b>			<b>8.361.819.661</b>		<b>951.920</b>	

Sedangkan untuk mutasi kurang Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.978.093.037 yang terdiri dari :

- Usulan Barang Rusak Berat pada Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp9.257.929.043 berupa kendaraan dinas bermotor sebanyak 25 unit, server sebanyak 2 unit, dan peralatan dan mesin sebanyak 185 unit, sesuai dengan surat Deputi Bidang Administrasi Nomor B.0380/Adm/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, hal Permohonan Izin Pemindahtempahan BMN Berupa Kendaraan Dinas Bermotor dan Server sebesar Rp7.534.637.132 dan surat Kepala Biro Umum Nomor B.0830/Adm-4/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020, hal Permohonan Izin Penjualan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet sebesar Rp1.723.291.911.
- Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan sebesar Rp52.030.000 berupa *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 1 Unit sesuai dengan Berita Acara Penggunaan Kembali Barang Milik Negara dari Penggunaan yang Sudah Dihentikan Penggunaannya Nomor: BA.22/Setkab/BMN/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020.
- Penghapusan ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp5.668.133.994 berupa *software* komputer (ATB) sebanyak 13 unit dalam kondisi tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi, tidak dapat dilakukan pemindahtempahan dan tidak dapat dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain sesuai Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tidak Berwujud di lingkungan Sekretariat Kabinet dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet.

Adapun rincian ATB yang telah dilakukan penghapusan adalah sebagai berikut:

**Tabel 34 Rincian ATB yang Dihapuskan per 31 Desember 2020**

No.	Nama ATB	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai
1	Sistem Informasi Workflow	1	2012	1	851.229.500
2	SIM Pegawai	3	2008	1	309.780.022
3	SIM PKP	5	2008	1	1.913.997.622
4	SIM WEB	6	2008	1	413.989.372
5	SIM Kepegawaian	8	2009	1	348.813.540
6	SIM Mail Tracking	11	2009	1	222.313.040
7	Penyusunan Grand Design SISKAB	14	2010	1	962.237.398
8	Aplikasi SISKA	16	2011	1	97.000.000
9	Sistem Informasi Keuangan	21	2013	1	88.577.500
10	SISKA Versi 2014 TA 2014	28	2014	1	72.000.000
11	Aplikasi SISKA TA 2015	29	2015	1	78.045.000
12	Sistem Informasi Personalia	32	2007	1	184.301.000
13	Sistem Informasi PUU	33	2007	1	125.850.000
<b>JUMLAH</b>					<b>5.668.133.994</b>

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp3.147.292.553)

### C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp3.147.292.553) dan (Rp9.876.605.894). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi Aset Lainnya berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan/amortisasi, dan nilai buku adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020**

No.	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Software	3.170.643.683	3.013.587.933	157.055.750
2	Lisensi	529.674.000	133.704.620	395.969.380
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-	-	-
4	ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>3.700.317.683</b>	<b>3.147.292.553</b>	<b>553.025.130</b>

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp5.835.511.728

### C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.835.511.728 dan Rp6.690.194.255. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

**Tabel 36 Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Uang Makan Pegawai bulan Desember yang masih harus dibayar	296,773,000	248,647,000
2	Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember yang masih harus dibayar	5,406,958,728	5,405,971,587
3	Tunjangan Kinerja Staf Khusus bulan Desember yang masih harus dibayar	130,160,000	65,080,000
4	Susulan Tunjangan Jabatan a.n Sigit Purnama bulan Oktober s.d Desember 2020	1,620,000	-
5	Hak Keuangan SKP dan SKWP berikut asisten dan pembantu asisten yang berstatus Non PNS bulan November dan Desember		828,364,494
6	Hak Keuangan SKP dan SKWP berikut asisten dan pembantu asisten yang berstatus PNS bulan November dan Desember		43,823,426
7	Tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat yang bertugas sebagai pejabat Plt/Plh		16,629,000
8	Kekurangan Tunjangan Jabatan Struktural Pejabat Sekretariat Kabinet bulan Okt s.d Des 2019		13,748,602
9	Kekurangan gaji/komponen gaji pegawai		67,930,146
<b>JUMLAH</b>		<b>5,835,511,728</b>	<b>6,690,194,255</b>

Seluruh nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.835.511.728 telah dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak pada bulan Januari 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2021, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Uang Makan Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet bulan Desember 2020 sebesar Rp296.773.000 telah dibayarkan sesuai SPM Nomor 70011, tanggal 14 Januari 2021 dan SP2D Nomor 210181303000093, tanggal 14 Januari 2021.
2. Tunjangan Kinerja Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat bulan Desember 2020 sebesar Rp5.406.958.728 telah dibayarkan sesuai SPM Nomor 70016, tanggal 19 Januari 2021 dan SP2D Nomor 21018130300225, tanggal 22 Januari 2021.
3. Tunjangan Staf Khusus bulan Desember 2020 sebesar Rp130.160.000 telah dibayarkan sesuai SPM Nomor 70015, tanggal 19 Januari 2021 dan SP2D Nomor 21018130300217, tanggal 21 Januari 2021.
4. Susulan Tunjangan Jabatan a.n Sigit Purnama bulan Oktober s.d Desember 2020 sebesar Rp1.620.000 telah dibayarkan sesuai SPM Nomor 70012, tanggal 18 Januari 2021 dan SP2D Nomor 21018130300236, tanggal 21 Januari 2021.

### C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.793.096.739 dan Rp3.272.809.348. Saldo ini merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.548.198.156 dan Rp28.635.585.480. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional pada Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.486.020.

### D.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp235.838.085.976 dan Rp366.301.524.681 atau mengalami penurunan 35,62 persen dari beban operasional periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut sehubungan dengan adanya *refocussing* dan realokasi kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berdampak pada penghematan anggaran belanja di beberapa Kementerian dan Lembaga. Beberapa penyebab penurunan Beban Operasional antara lain:

1. Penurunan Beban Pegawai sebesar Rp30.433.500.690 atau sebesar 16,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya TA 2020 yang hanya diberikan kepada PNS level eselon III kebawah berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat tidak termasuk tunjangan kinerja. Disamping itu, adanya penerapan kebijakan WFH dan pembatasan uang lembur dan uang makan lembur bagi

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 juga menyebabkan menurunnya penyerapan beban pegawai.

2. Penurunan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp75.297.871.109 atau 85,89 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan volume kegiatan perjalanan dinas dalam rangka melakukan studi banding, menghadiri konferensi, seminar, penyuluhan, serta pengadaan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai dampak adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB transisi selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona. Selain itu, adanya penghematan/pemotongan anggaran yang menyebabkan penurunan beban barang operasional, belanja barang non operasional, serta belanja jasa.
3. Penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp24.716.315.317 atau 33,47 persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan Belanja Barang dan Jasa tersebut meliputi penurunan Beban Kebutuhan Perkantoran, Beban Bahan, Beban Barang Non Operasional Lainnya, Beban Sewa, Beban Jasa, dan Beban Jasa Lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan internal dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut mengatur tentang sistem kerja pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal/WFH dan pemanfaatan *Video Conference* dalam penyelenggaraan rapat/pertemuan.

Sampai dengan 31 Desember 2020, realisasi beban operasional untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan akun untuk penanganan pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp4.000.898.940 atau 76,22 persen sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 37 Realisasi Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020**

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	869.364.000	731.327.250	138.036.750	84,12
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	51.305.000	35.363.500	15.941.500	68,93
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	42.200.000	37.670.000	4.530.000	89,27
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.067.883.000	3.039.780.800	1.028.102.200	74,73
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	218.230.000	156.757.390	61.472.610	71,83
<b>JUMLAH</b>		<b>5.248.982.000</b>	<b>4.000.898.940</b>	<b>1.248.083.060</b>	<b>76,22</b>

Sekretariat Kabinet juga telah melakukan ralat SPM atas akun-akun yang belum menggunakan akun penanganan pandemi COVID-19 menjadi akun-akun penanganan pandemi COVID-19. Berikut daftar ralat SPM yang dilakukan Sekretariat Kabinet sampai dengan 31 Desember 2020.

**Tabel 38 Rincian Ralat SPM Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2020**

No	AKUN SEMULAJI	AKUN MENJADI	Uraian	Realisasi	SPM	SP2D
1	521111 Beban Keperluan Perkantoran	521131 Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Penambahan Daya Tahan Tubuh dalam rangka Tanggap Darurat Covid-19	95.380.000,00	80122	200181302008523
2	521111 Beban Keperluan Perkantoran	521841 Beban Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	Pengadaan Hand Sanitizer dan Cairan Isi Ulang Hand Sanitizer untuk Pejabat dan Pegawai Sekretariat Kabinet	35.770.000,00	80313	200181701000879
3	521119 Beban Barang Operasional Lainnya	521131 Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Pengadaan Anti Corona Kit Sekretariat Kabinet	49.665.000,00	80095	200181303017126
4	521119 Beban Barang Operasional Lainnya	521131 Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Pengadaan Anti Corona Kit Sekretariat Kabinet	19.866.000,00	80096	200181303017127
5	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	522192 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Setkab tanggal 8 s.d. 15 April 2020	128.720.000,00	70175	200181302007152
6	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	522192 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 Tahap II bagi Pejabat Pegawai di Lingkungan Setkab tanggal 22 s.d. 27 Mei 2020	116.726.000,00	70185	200181302007421
7	523119 Beban Pemeliharaan Lainnya	522192 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	Penyemprotan Disinfektan Ruang Kerja	40.525.000,00	80101	200181302007480
8	523119 Beban Pemeliharaan Lainnya	522192 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	Penyemprotan Disinfektan Ruang Kerja	8.350.000,00	80117	200181302008060
<b>JUMLAH</b>				<b>495.002.000</b>		

Beban Pegawai  
Rp155.912.584.628

### D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp155.912.584.628 dan Rp186.346.085.318 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	%
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	35.013.519.139	36.737.791.287	-4,69
5115	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	210.000.000	175.000.000	20,00
5122	Beban Lembur	366.125.000	1.322.340.000	-72,31
5124	Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	120.322.940.489	148.110.954.031	-18,76
<b>JUMLAH BEBAN PEGAWAI</b>		<b>155.912.584.628</b>	<b>186.346.085.318</b>	<b>-16,33</b>

*Beban Persediaan  
Rp5.195.588.687*

#### **D.2.2 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.195.588.687 dan Rp6.033.820.008 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	%
593111	Beban Persediaan Barang Konsumsi	3.019.338.687	4.036.870.008	-25,21
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	2.176.250.000	1.996.950.000	8,98
<b>JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN</b>		<b>5.195.588.687</b>	<b>6.033.820.008</b>	<b>-13,89</b>

Berdasarkan tabel diatas, Penurunan Beban Persediaan Barang Konsumsi disebabkan adanya kebijakan WFH bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, sehingga penggunaan atas Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetakan dan perabot kantor lainnya menurun. Sedangkan kenaikan Beban Persediaan Bahan Baku disebabkan adanya penambahan penggunaan kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.

*Barang dan Jasa  
Rp49.109.530.429*

#### **D.2.3. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.109.530.429 dan Rp73.825.845.746 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 41 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	%
5211	Beban Barang Operasional	17.743.148,961	24.026.348,104	-26,15
5212	Beban Barang Non Operasional	7.627.311,124	22.985.553,254	-66,82
5221	Beban Jasa	23.739.070,344	26.777.340,988	-11,35
5951	Beban Aset Ektakomptabel Peralatan dan Mesin	0	36.603.400	-
<b>JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA</b>		<b>49.109.530,429</b>	<b>73.825.845,746</b>	<b>-33,48</b>

Dari jumlah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp49.109.530.429 tersebut, terdapat realisasi beban untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) sebesar Rp731.327.250 yang digunakan untuk pengadaan *anti corona kit*, penambah daya tahan tubuh, pengadaan *hand sanitizer*, pengadaan alat pelindung diri berupa masker dan *face shield*, dan termasuk juga biaya paket data dan komunikasi pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet selama bulan September s.d Desember 2020.
2. Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) sebesar Rp35.363.500 yang digunakan untuk biaya komunikasi/paket data untuk pendidikan dan pelatihan secara daring, serta untuk kebutuhan rutin lainnya untuk pelaksanaan sidang kabinet dan pertemuan lain yang dipimpin oleh Presiden.
3. Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) sebesar Rp3.034.929.800 yang digunakan untuk penyemprotan disinfektan pada ruang kerja, pemberian suntik vitamin C dan pengadaan *Rapid Test*, PCR SARS COV-2 bagi pejabat/pegawai dan keluarga pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengadaan disinfektan *spray*, dan pembayaran honor narasumber. Namun demikian, Sekretariat Kabinet telah melakukan jurnal penyesuaian/umum secara manual pada aplikasi SAIBA terhadap kesalahan penggunaan akun sebesar Rp4.851.000 yang berupa pembelian Disinfektan Anti Virus dan Disinfektan *Spray* masing masing sebanyak 60 kaleng pada SPM Nomor 80217 yang semula dibebankan sebagai akun belanja jasa penanganan pandemi COVID-19 (522192) menjadi akun persediaan penanganan pandemi COVID-19 (521841).



Beban Pemeliharaan  
Rp6.780.248.709

#### D.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.780.248.709 dan Rp5.330.754.713 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.922.040.908	1.738.727.893	10.54
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56.917.170	83.873.835	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.720.074.051	2.985.497.075	24.60
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	965.780.530	354.890.910	172.13
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	115.436.050	167.765.000	-31.19
<b>JUMLAH</b>		<b>6.780.248.709</b>	<b>5.330.754.713</b>	<b>27.19</b>

Dari jumlah realisasi Beban pemeliharaan sebesar Rp6.780.248.709 tersebut, tidak terdapat beban khusus untuk penanganan pandemi COVID-19.

Beban Perjalanan Dinas  
Rp12.369.336.288

#### D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.369.336.288 dan Rp87.667.207.397 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	6.398.518.112	24.407.870.395	-73.79
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	494.013.000	1.367.460.000	-63.87
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	923.557.780	9.660.507.444	-90.44
524115	Beban Perjalanan Dinas-Pengangan Pandemi COVID-19	156.757.390	0	100.00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.785.258.223	30.557.238.119	-87.61
524219	Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	611.231.783	21.674.131.439	-97.18
<b>JUMLAH</b>		<b>12.369.336.288</b>	<b>87.667.207.397</b>	<b>-85.89</b>

Dari jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp12.369.336.288 terdapat Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19 (524115) sebesar Rp156.757.290 yang digunakan untuk bantuan transportasi bagi para pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet yang melaksanakan *Work From Office* (WFO) pada masa darurat COVID-19 selama periode 16 Maret s.d 4 Juni 2020. Kebijakan pemberian bantuan transportasi ini sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker Sekretariat Kabinet dalam Masa Darurat COVID-19.



Beban Penyusutan dan  
Amortisasi Rp6.470.797.235

#### D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.470.797.235 dan Rp7.097.811.499 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.012.030.528	6.703.600.008	-10,32
592115	Beban Amortisasi Software	141.320.500	345.234.531	-59,07
592116	Beban Amortisasi Lisensi	51.539.535	37.729.210	36,60
592118	Beban Amortisasi Software yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-	9.755.625	-
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	265.906.672	1.492.125	17720,67
<b>JUMLAH</b>		<b>6.470.797.235</b>	<b>7.097.811.499</b>	<b>-8,83</b>

Surplus Kegiatan Non  
Operasional Rp514.651.329

#### D.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp514.651.329 dan (Rp196.612.751) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019

AKUN	URAIAN	2020	2019	%
<b>Kegiatan Non Operasional</b>				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin	89.010.999	-	-
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	90.479.764	244.760.544	-
<b>Jumlah Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>			<b>(1.468.765)</b>	<b>(244.760.544)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5.003.414	6.735.000	-25.71
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	447.305.547	9.289.038	4715.41
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	92.622.610	-	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	53.910.680	66.476.269	-18,90
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	22.796.265	34.352.514	-33,64
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	59.925.892	-	-
<b>Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar</b>			<b>516.120.094</b>	<b>48.147.793</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			<b>514.651.329</b>	<b>(196.612.751)</b>
				<b>(361.76)</b>

Pendapatan Pelepasan Aset  
Non Lancar Rp89.010.999

#### D.3.1 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp89.010.999 dan Rp0. Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat. Pemindah tanginan BMN tersebut yang dilakukan melalui penjualan secara lelang dengan sistem *E-Auction* oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)



Jakarta II dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.000.999 sesuai dokumen kuitansi Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta II Nomor: KW-49/2020, tanggal 4 Februari 2020 dan NTPN Nomor C4C4E7QLTJI05F9A, tanggal 5 Februari 2020. BMN yang dilelang tersebut sesuai salinan Risalah Lelang Nomor 50/26/2020, tanggal 30 Januari 2020 berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin dengan harga limit sebesar Rp15.839.500.
2. Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.010.000 sesuai dokumen kuitansi Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta II Nomor: KW-425/2020, tanggal 19 November 2020 dan NTPN Nomor 844CD1JNEQCJ88SP tanggal 20 November 2020. BMN yang dilelang tersebut sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 561/26/2020, tanggal 18 November 2020 berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin dan persediaan dengan harga limit sebesar Rp4.780.000.

*Beban Pelepasan Aset Non  
Lancar Rp90.479.764*

### **D.3.2 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR**

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp90.479.764 dan Rp244.760.544. Beban tersebut merupakan nilai buku Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan yang telah diusulkan kepada Pengguna Barang untuk dilakukan pemindah tangannya melalui penjualan/lelang.

*Pendapatan Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp598.842.251*

### **D.3.3 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp598.842.251 dan Rp82.500.307. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp5.003.414, berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji

- pokok PNS, tunjangan struktural PNS dan belanja tunjangan PPh PNS.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp447.305.547, berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, luar kota dan luar negeri.
  - c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp92.622.610, berupa kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa renovasi ruang kerja lantai 3 dan 4 serta lantai 3 sayap selatan, Gedung III, karena terdapat penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
  - d. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp53.910.680. Penyesuaian nilai dimaksud disebabkan oleh adanya kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) untuk menilai persediaan pada saat pelaporan.

*Beban Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp82.722.157*

#### **D.3.4 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.722.157 dan Rp34.352.514. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari:

- 1. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp22.796.265. Penyesuaian nilai persediaan dimaksud disebabkan oleh adanya kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan metode FIFO untuk menilai persediaan pada saat pelaporan (tanggal 31 Desember 2020).
- 2. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp59.925.892. Beban Persediaan Rusak/Usang dimaksud disebabkan adanya kondisi barang persediaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mengalami perubahan dalam spesifikasi. Hal ini berdasarkan Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Persediaan Nomor: BA.20/Setkab/BMN/09/20, tanggal 14 September 2020 sebesar Rp14.413.292 dan Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor BA.21/Setkab/BMN/09/2020, tanggal 29 September 2020 sebesar Rp45.512.600.



Defisit Laporan Operasional  
(Rp235.323.434.647)

#### **D.4 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL**

Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp235.323.434.647) dan (Rp366.493.651.412). Defisit Laporan Operasional berasal dari selisih antara pendapatan operasional sebesar Rp0 dikurangi dengan beban operasional sebesar (Rp235.838.085.976) dan ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp514.651.329.

Ekuitas Awal  
Rp28.635.585.480

#### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

##### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp28.635.585.480 dan Rp9.350.205.098.

Defisit LO  
(Rp235.323.434.647)

##### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp235.323.434.647) dan (Rp366.493.651.412).

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

##### **E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

###### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Jumlah koreksi atas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp66.129.920. Sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terdapat koreksi atas Nilai Persediaan.

Koreksi Reklasifikasi  
Persediaan/Aset Tetap/Aset  
Lainnya Rp0

###### **E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya**

Jumlah Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp401.537.400.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non  
Revaluasi (Rp21.831.890)

###### **E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Jumlah koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp21.831.890) dan Rp401.537.400. Koreksi tersebut merupakan transaksi dari koreksi pencatatan dan perubahan nilai berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang kerja lantai 3 dan 4 serta lantai 3 sayap selatan.



#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp217.257.879.213 dan Rp385.712.901.874. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 46 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019

Transaksi Antar Entitas	2020	2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	231.593.164.881	387.471.129.222
Diterima dari Entitas Lain	(1.669.166.886)	(2.159.553.879)
Transfer Keluar	(12.666.118.782)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	401.326.531
<b>Jumlah</b>	<b>217.257.879.213</b>	<b>385.712.901.874</b>

DKEL Rp231.593.164.881

DDEL(Rp1.669.166.886)

#### Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah DKEL sebesar Rp231.593.164.881 dan jumlah DDEL sebesar (Rp1.669.166.886).

Transfer Keluar  
Rp12.666.118.782

Jumlah Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp12.666.118.782 dan Rp0. Transfer keluar tersebut terdiri dari:

1. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Sekretariat Kabinet dan BPIP Nomor: BAST-001/Adm/04/2020, tanggal 20 April 2020 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin dengan nilai buku sebesar Rp2.576.451.385. Nilai buku tersebut berasal dari nilai perolehan sebesar Rp3.944.272.800 (intrakomptabel) dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.367.821.415 sebanyak 455 unit.
2. Transfer Keluar Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi yang diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: BAST-02/ADM/11/2020, tanggal 16 November 2020, yang terdiri dari Renovasi Lantai 3 dan Lantai

4 Gedung III Kementerian Sekretariat Negara dan lantai 3 Sayap Selatan Gedung III Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai buku sebesar Rp10.089.667.397.

*Ekuitas Akhir  
Rp10.548.198.156*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.548.198.156 dan Rp28.635.585.480. Sampai dengan 31 Desember 2020 terjadi penurunan ekuitas sebesar (Rp18.087.387.324) dari nilai ekuitas pada 1 Januari 2020 sebesar Rp28.635.585.480.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

*Barang Milik Negara*

### **F.1 BARANG MILIK NEGARA**

1. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet melakukan penggunaan sementara atas gedung dan bangunan Gedung III Kementerian Sekretariat Negara yang telah disetujui oleh Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-183/MK.6/KN.5/2019, tanggal 30 April 2019, hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Sekretariat Kabinet, serta Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Nomor PERJ-05/Kemensetneg/Ses/05/2019 dan Perjanjian Nomor PERJ-1/Setkab/Adm/ 05/2019. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menggunakan sementara gedung yang terletak di jalan Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Nomor PERJ-12/Kemensetneg/Ses/09/2019 dan Perjanjian Nomor PERJ-2/Setkab/Adm/09/2019.
2. Nilai perolehan BMN Ekstrakomptabel yang dimiliki Sekretariat Kabinet Per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp97.880.040. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat mutasi tambah Rp167.630.520 dan mutasi kurang Rp4.703.840 sehingga nilai perolehannya per 31 Desember 2020

sebesar Rp260.806.720. Nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp84.573.350, sehingga nilai buku BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp176.233.370. Rincian BMN Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2020**

No.	Ekstrakomptabel	Nilai Perolehan Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Peralatan dan Mesin	97.880.040	166.678.600	3.751.920	260.806.720	84.573.350	176.233.370
1	Alat Kantor	11.458.000	9.320.000	1.700.000	19.078.000	6.754.900	12.323.100
2	Alat Rumah Tangga	29.085.400	16.571.100	1.925.000	43.731.500	12.151.980	31.579.520
3	Alat Studio	13.325.000	140.787.500	-	154.112.500	27.766.750	126.345.750
4	Alat Komunikasi	32.041.640	-	126.920	31.914.720	31.914.720	-
5	Peralatan Komputer	11.970.000	-	-	11.970.000	5.985.000	5.985.000
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	-	951.920	951.920	-	-	-
1	Alat Kantor	-	825.000	825.000	-	-	-
2	Alat Komunikasi	-	126.920	126.920	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>97.880.040</b>	<b>167.630.520</b>	<b>4.703.840</b>	<b>260.806.720</b>	<b>84.573.350</b>	<b>176.233.370</b>

Mutasi tambah BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp167.630.520 berasal dari:

- Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp166.678.600 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel s.d. 31 Desember 2020**

No.	Nama Barang	Volume	Rupiah	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D
1	Web Camera M-Tech	11 Unit	3.630.000	80136	14 Juli 2020	200181701000879	15 Juli 2020
2	Teko Listrik	5 unit	4.262.500	80147	12 Agustus 2020	200181701001805	13 Agustus 2020
	<i>Standing Mic</i>	1 unit	715.000				
3	Logitech Webcam B525	189 Unit	131.355.000	80161	26 Agustus 2020	200181701002137	27 Agustus 2020
4	<i>Uv Sterilizer Box</i>	2 unit	1.750.000	80174	29 September 2020	200181701003552	29 September 2020
	<i>Papan Nama Meja Ukir</i>	1 unit	960.000				
7	Kompor Listrik	1 buah	850.000	80127	30 November 2020	200181302008582	16 Juli 2020
8	Jam Dinding	10 buah	3.000.000	80147	12 Agustus 2020	200181701001805	13 Agustus 2020
	<i>UVC Box SterilizerRemote</i>	4 unit	3.600.000				
5	Flipchart magnetic	2 buah	1.980.000	80197	2 November 2020	200181701004760	3 November 2020
	<i>Mic Wireless Clip On</i>	2 buah	935.000				
6	<i>Ring LightLightweight Tripod</i>	2 buah	407.000	80203	6 November 2020	200181701005066	9 November 2020
	<i>Lightweight Tripod</i>	1 buah	308.000				
	<i>Portable Speaker</i>	1 buah	853.600				
	<i>Fog Machine Disinfectant</i>	8 unit	6.380.000				
9	Petaka 3 lubang dengan tiang bendera	2 set	1.540.000	80249	31 Desember 2020	200181701009982	31 Desember 2020
	<i>Clip on</i>	4 unit	3.960.000				
	<i>Tripod</i>	1 buah	192.500				
<b>JUMLAH</b>			<b>166.678.600</b>				

- Reklasifikasi masuk dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp951.920 berupa 3 unit Mesin Hitung Elektronik senilai Rp825.000 dan 1 unit pesawat telepon senilai Rp126.920 sesuai dengan Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Barang Milik Negara dari Penggunaan Nomor 12/Setkab/BMN/05/2020, tanggal 5 Mei 2020.

Sedangkan mutasi kurang BMN ekstrakomptabel sebesar Rp4.703.840 berasal dari:

- a. Mutasi kurang Perlatan dan Mesin sebesar Rp3.751.920 terdiri dari:
1. Penghentian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penggunaan sebesar Rp951.920 berupa 3 unit Mesin Hitung Elektronik senilai Rp825.000 dan 1 unit pesawat telepon senilai Rp126.920. Transaksi ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Barang Milik Negara dari Penggunaan Nomor:12/Setkab/BMN/05/2020, tanggal 5 Mei 2020.
  2. Transfer keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 11 unit jam mekanis senilai Rp1.925.000 dan 5 unit kalkulator senilai Rp875.000 yang dialihkan status penggunaannya kepada Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Transfer keluar ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BAST-0001/Adm/BMN/04/2020, tanggal 20 April 2020
- b. Mutasi kurang Aset Tetap yang Tidak digunakan sebesar Rp951.920 berupa 3 unit Mesin Hitung Elektronik senilai Rp825.000 dan 1 unit pesawat telepon senilai Rp126.920. Transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin dan Barang Persediaan di lingkungan Sekretariat Kabinet dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet.

*Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK*

## **F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2019 pada bulan Februari sampai dengan Mei 2020. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 terlampir pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

### **F.3 REKENING PEMERINTAH**

Rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabinet dibuka di Bank Negara Indonesia 46 Cabang Harmoni dengan nomor rekening 0018306949. Pembukaan rekening tersebut dilakukan atas dasar surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I atas nama Menteri Keuangan Nomor S-1463/WPB.12/KP.018/2015, tanggal 17 April 2015, hal Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Sekretariat Kabinet, dengan nama rekening baru BPG 018 Sekretariat Kabinet. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp621.207.807.



Lampiran I: Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

**SEKRETARIAT KABINET**  
**RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN/AMORTISASI, AKUMULASI**  
**PENYUSUTAN/AMORTISASI DAN NILAI BUKU ASET TETAP DAN ASET LAINNYA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 AUDITED**

No	Keterangan	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm Peny Periode ini	Total Akm. Peny. s,d 31 Des 20	Nilai Buku Per 31 Des 20
			s,d 31 Des 2020	1 s,d 31 Des 2020	1 s,d 31 Des 2020		
<b>A</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Bantu	615,854,740	303,428,879	67,153,148	-	370,582,027	245,272,713
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	15,819,923,342	21,415,516,061	312,556,445	(5,974,448,814)	15,753,623,692	66,299,650
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	19,228,058	18,278,058	950,000	-	19,228,058	-
4	Alat Bengkel Bermesin	10,725,000	6,971,250	1,072,500	-	8,043,750	2,681,250
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	1,170,000	585,000	234,000	-	819,000	351,000
6	Alat Ukur	3,450,000	3,450,000	-	-	3,450,000	-
7	Alat Kantor	5,025,225,942	3,200,140,747	511,916,070	(167,645,500)	3,544,411,317	1,480,814,625
8	Alat Rumah Tangga	9,643,287,399	3,504,869,479	1,658,637,847	(432,201,733)	4,731,305,593	4,911,981,806
9	Alat Studio	1,561,989,513	1,133,935,838	136,737,175	(26,372,700)	1,244,300,313	317,689,200
10	Alat Komunikasi	810,317,601	802,111,001	12,223,800	(17,872,500)	796,462,301	13,855,300
11	Peralatan Pemancar	5,700,000	1,425,000	570,000	-	1,995,000	3,705,000
12	Komputer Unit	9,637,311,853	8,129,564,882	1,601,787,301	(1,896,506,498)	7,834,845,685	1,802,466,168
13	Peralatan Komputer	11,503,133,095	7,473,028,364	1,708,192,242	(571,067,615)	8,610,152,991	2,892,980,104
<b>Jumlah Penyusutan</b>		<b>54,657,316,543</b>	<b>45,993,304,559</b>	<b>6,012,030,528</b>	<b>(9,086,115,360)</b>	<b>42,919,219,727</b>	<b>11,738,096,816</b>
<b>B</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	-	565,120,000	255,859,172	(820,979,172)	-	-
2	Peralatan Komputer	-	688,919,382	6,250,000	(695,169,382)	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>		<b>-</b>	<b>1,254,039,382</b>	<b>262,109,172</b>	<b>(1,516,148,554)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyusutan (A + B)</b>		<b>54,657,316,543</b>	<b>47,247,343,941</b>	<b>6,274,139,700</b>	<b>(10,602,263,914)</b>	<b>42,919,219,727</b>	<b>11,738,096,816</b>
<b>C</b>	<b>ASET TAK BERWUJUD</b>						
1	Software	3,170,643,683	2,872,267,433	141,320,500	0	3,013,587,933	157,055,750
2	Lisensi	529,674,000	82,165,085	51,539,535	0	133,704,620	395,969,380
<b>Jumlah Amortisasi</b>		<b>3,700,317,683</b>	<b>2,954,432,518</b>	<b>192,860,035</b>	<b>0</b>	<b>3,147,292,553</b>	<b>553,025,130</b>
<b>D</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah</b>						
1	Aset Tak Berwujud	-	5,668,133,994	-	(5,668,133,994)	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>		<b>-</b>	<b>5,668,133,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Amortisasi (C + D)</b>		<b>3,700,317,683</b>	<b>8,622,566,512</b>	<b>192,860,035</b>	<b>-</b>	<b>3,147,292,553</b>	<b>553,025,130</b>
<b>Total Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>58,357,634,226</b>	<b>55,869,910,453</b>	<b>6,466,999,735</b>	<b>(10,602,263,914)</b>	<b>46,066,512,280</b>	<b>12,291,121,946</b>

07

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2020**  
**( DALAM RUPIAH )**

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 114  
 ESELON 1 : 01  
 WILAYAH/PROVINSI : 0199  
 SATUAN KERJA : 403112

SEKRETARIAT KABINET  
 SEKRETARIAT KABINET  
 INSTANSI PUSAT  
 SEKRETARIAT KABINET

Lampiran II : Neraca Percobaan Akrual

Kode Laporan : NPSAIKT  
 Tanggal : 15-04-21  
 Halaman : 1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAA	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	1,793,096,739	
0	117111	Barang Konsumsi	2,851,349,815	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	84,755,100	
0	117131	Bahan Baku	9,300,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	54,657,316,543	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	742,783,023	
0	136111	Konstruksi Dalam pekerjaan	98,500,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		42,919,219,727
0	162151	Software	3,170,643,683	
0	162161	Lisensi	529,674,000	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	305,900,000	
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		3,013,587,933
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi		133,704,620
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		5,835,511,728
0	219511	Uang Muka dari KPPN		1,793,096,739
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		231,593,164,881
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,669,166,886	
0	313211	Transfer Keluar	12,666,118,782	
0	391111	Ekuitas		28,635,585,480
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	21,831,890	
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		89,010,999
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		5,003,414
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		447,305,547
3	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		92,622,610
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		53,910,680
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	22,555,473,860	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		11,395,027
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	349,950	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		597
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,542,221,076	
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		1,333,240
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	429,818,702	
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS		151,296
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,493,705,000	
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		1,260,000

drg

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2020**  
**( DALAM RUPIAH )**

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA** : 114  
**ESELON** : 01  
**WILAYAH/PROPINSI** : 0199  
**SATUAN KERJA** : 403112

**SEKRETARIAT KABINET**  
**SEKRETARIAT KABINET**  
**INSTANSI PUSAT**  
**SEKRETARIAT KABINET**

**Lampiran II : Neraca Percobaan Aktual**

Kode Laporan : NPSAIKT  
 Tanggal : 15-04-21  
 Halaman : 2

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRA	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	114,910,000	
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS		700,000
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	194,713,671	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,064,284,320	
3	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS		289,680
3	511129	Beban Uang Makan PNS	4,169,870,000	
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS		1,357,500
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	467,260,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		2,600,100
3	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	210,000,000	
3	512211	Beban Uang Lembur	366,125,000	
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	120,422,460,980	
3	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		99,520,491
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12,096,201,906	
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran		4,267,000
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	229,653,789	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	753,980,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,941,264,800	
3	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya		5,011,784
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	731,327,250	
3	521211	Beban Bahan	4,700,369,555	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,510,410,000	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,381,168,069	
3	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	35,363,500	
3	522113	Beban Langganan Air	6,114,132	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	260,635,650	
3	522141	Beban Sewa	18,337,312,675	
3	522151	Beban Jasa Profesi	1,592,560,000	
3	522191	Beban Jasa Lainnya	507,518,087	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,034,929,800	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,922,040,908	
3	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,917,170	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,720,074,051	
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	965,780,530	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	6,402,538,112	

drg

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2020  
( DALAM RUPIAH )**

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 114  
ESELON : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 0199  
SATUAN KERJA : 403112

SEKRETARIAT KABINET  
SEKRETARIAT KABINET  
INSTANSI PUSAT  
SEKRETARIAT KABINET

Lampiran II : Neraca Percobaan Akrual

Kode Laporan : NP\$AIKT  
Tanggal : 15-04-21  
Halaman : 3

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		4,020,000
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	494,013,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	925,961,420	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		2,403,640
3	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	156,757,390	
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,793,364,223	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		8,106,000
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	611,231,783	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,012,030,528	
3	592115	Beban Amortisasi Software	141,320,500	
3	592116	Beban Amortisasi Lisensi	51,539,535	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	265,906,672	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,019,338,687	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	115,436,050	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,176,250,000	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	22,796,265	
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	90,479,764	
3	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	59,925,892	
		J U M L A H	314,754,140,713	314,754,140,713



WWW.SETKAB.GO.ID  
JL. VETERAN 17-18 JAKARTA PUSAT

#setkablawancovid19 #lindungidiri #lindungisesama #jagaprotokolkesehatan